

ABSTRAK

Hazel Mardatilla Tassya Pratiwi (01043180149)

KERJASAMA INDONESIA DENGAN ASEAN-WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK DALAM MENANGANI ISU PERDAGANGAN ILEGAL FAUNA ENDEMIK INDONESIA (2005-2020)

(xiv + 89 halaman: 1 gambar; 1 lampiran)

Kata Kunci: Organisasi Regional; NGO; IGO; Isu Keamanan non-tradisional; Fauna Endemik; Pelestarian Lingkungan.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman satwa endemik, namun keanekaragaman ini menjadi tantangan tidak hanya bagi kawasan tetapi juga bagi negara Indonesia. Seiring dengan semakin terintegrasinya ekonomi kawasan, isu lingkungan menjadi isu penting bagi Negara Indonesia. Fenomena ini semakin menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi isu keamanan non-tradisional di Indonesia. Isu perdagangan ilegal satwa endemik merupakan titik awal komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis naratif, dan menggunakan metode *historical comparative*. Teori yang digunakan yaitu teori neoliberalisme. Isu keamanan non-tradisional ini membawa Indonesia untuk terus melakukan kerjasama baik secara regional maupun internasional dalam melindungi fauna endemik. Pada penelitian ini dapat terlihat peran Indonesia dalam institusi regional ASEAN-WEN dalam mengatasi isu keamanan non-tradisional. Tentu dalam upaya memberantas perdagangan ilegal, Negara Indonesia mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional UNEP, IUCN, dan USAID. Serta dukungan dari organisasi non-pemerintah WWF, dan TRAFFIC *Wildlife Trade Specialist*. Dukungan ini menjadi bukti bahwa dalam mengatasi isu lingkungan Negara Indonesia tidak dapat bergerak sendiri, melainkan membutuhkan bantuan internasional, regional, dan kerjasama antar negara anggota. Terakhir, penelitian ini menunjukkan keseriusan Negara Indonesia dengan berperan aktif dalam agenda memberantas perdagangan ilegal, dan mengadopsi konvensi internasional CITES ke dalam hukum domestik.

Referensi: 5 Buku + 37 artikel + 26 Internet

ABSTRACT

Hazel Mardatilla Tassya Pratiwi (01043180149)

INDONESIA'S COOPERATION WITH ASEAN-WILDLIFE ENFORCEMENT NETWORK IN ADDRESSING THE ISSUE OF ILLEGAL TRADE IN ENDEMIC FAUNA OF INDONESIA (2005-2020)

(xiv + 89 pages: 1 image; 1 attachments)

Keywords: Regional Organization; NGOs; IGO's; Non-traditional Security Issues; Endemic Fauna; Environmental Conservation

Southeast Asia is a region rich in endemic wildlife diversity, but this diversity is a challenge not only for the region but also for the Indonesian state. Along with the increasingly integrated economy of the region, environmental issues become an important issue for the State of Indonesia. This phenomenon further demonstrates the importance of the government's role in addressing non-traditional security issues in Indonesia. The issue of illegal trade in endemic animals is the starting point of Indonesia's commitment to international conventions. Data collection in this study is done using primary data and secondary data with qualitative research types. As for data analysis using narrative analysis and using historical-comparative methods. The theory used is neoliberalism. This non-traditional security issue led Indonesia to continue to cooperate both regionally and internationally in protecting endemic fauna. In this research, Indonesia's role in ASEAN-WEN regional institutions can be seen in addressing non-traditional security issues. Of course, to eradicate illegal trade, the State of Indonesia has the support of various international organizations UNEP, IUCN, and USAID. As well as support from non-governmental organization WWF, and TRAFFIC Wildlife Trade Specialist. This support is proof that in addressing environmental issues, the State of Indonesia cannot move on its own, but rather requires international, regional, and cooperation between member states. Finally, this study demonstrates the seriousness of the State of Indonesia by playing an active role in the agenda of eradicating illegal trade and adopting the CITES international convention into domestic law.

References: 5 Book + 37 Articles + 26 Internet